

Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Natalitas di Indonesia: Studi Literatur

Dinda Rizki Yanti*, Anggi Agustina, Erinaldi

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

Abstrak: Kajian ini berfokus untuk mengetahui efektivitas kebijakan program Keluarga Berencana (KB) dalam menekan angka kelahiran di Indonesia. Melalui pendekatan studi literatur, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan KB sebagai instrumen pengendalian pertumbuhan penduduk, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta perumusan kebijakan kependudukan yang lebih optimal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, menelaah jurnal, artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan situs resmi pemerintah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengolah berbagai sumber yang relevan, seperti buku dan jurnal ilmiah. Selain itu juga dari laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, serta situs resmi lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan program Keluarga Berencana di Indonesia. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan tingkat kredibilitas, relevansi, serta kemutakhiran informasinya. Menurut Tingkat Kesuburan Total (TKT), Program Keluarga Berencana (KB) Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menurunkan angka kelahiran. TKT Indonesia telah turun dari sekitar 2,6 anak per wanita pada awal 2010-an menjadi sekitar 2,3 pada 2024, menurut data terbaru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jumlah rata-rata anak per wanita selama masa reproduksinya kini mendekati tingkat penggantian populasi optimal untuk pembangunan berkelanjutan, yang mencerminkan efektivitas metode kontrasepsi. Program ini tidak hanya mengurangi jumlah kelahiran tetapi juga meningkatkan kualitas keluarga dengan mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan ibu dan anak. Namun, masalah seperti persepsi masyarakat terhadap kontrasepsi yang tidak baik, kekurangan tenaga penyuluh, dan ketimpangan antar wilayah masih menjadi masalah.

Kata kunci: Program Keluarga Berencana, Efektivitas, Penurunan Natalitas, Kebijakan Publik, Indonesia.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.373>

*Correspondence: Dinda Rizki Yanti

Email: rizkyyantidinda@gmail.com

Received: 30-01-2026

Accepted: 30-02-2026

Published: 30-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study focuses on determining the effectiveness of the Family Planning (KB) program in reducing the birth rate in Indonesia. Through a literature review approach, this study aims to provide a more comprehensive understanding of the effectiveness of the KB policy as an instrument of population control, while also contributing to the development of public administration science and the formulation of more optimal population policies. The method used is a qualitative approach with a literature study, examining journals, scientific articles, books, research reports, laws and regulations, and official government websites. The data collection process was carried out by reading, recording, and processing various relevant sources, such as books and scientific journals. In addition, data was also collected from activity reports, laws and regulations, and official websites of government agencies related to the implementation of the Family Planning program in Indonesia. These sources were selected based on their credibility, relevance, and timeliness of information. According to the Total Fertility Rate (TFR), Indonesia's Family Planning Program (KB) has shown significant progress in reducing birth rates. Indonesia's TFR has fallen from around 2.6 children per woman in the early 2010s to around 2.3 in 2024, according to the latest data from the National Population and Family Planning Agency (BKKBN). The average number of children per woman during her reproductive years is now approaching the optimal population replacement level for sustainable development, reflecting the effectiveness of contraceptive methods. This program not only reduces the number of births but also improves the quality of families by regulating birth spacing and maintaining the health of mothers and children. However, issues such as negative public perceptions of contraception, a shortage of extension workers, and regional disparities remain problems.

Keywords: Family Planning Program, Effectiveness, Birth Rate Reduction, Public Policy, Indonesia

Pendahuluan

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh World Health Organization (WHO), keluarga berencana merupakan suatu praktik yang bertujuan untuk membantu individu maupun pasangan dalam merencanakan jumlah anak yang diinginkan serta mengatur jarak dan waktu kelahiran.

Tujuan tersebut dicapai melalui penggunaan berbagai metode kontrasepsi yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan reproduksi masing-masing individu. Program Keluarga Berencana (KB) merupakan bagian yang terintegrasi dalam program pembangunan nasional dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik dari aspek ekonomi, spiritual, maupun sosial budaya. Melalui program ini, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara jumlah penduduk dan kemampuan produksi nasional. Sebagai salah satu instrumen kebijakan kependudukan, program KB diharapkan dapat menumbuhkan penerimaan terhadap konsep Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), yang berorientasi pada terciptanya pertumbuhan penduduk yang seimbang (Daud, 2022).

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), hasil Sensus Penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 270 juta jiwa, hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 1961. Meskipun laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tren penurunan, secara absolut penambahan jumlah penduduk masih cukup besar setiap tahunnya, yaitu rata-rata 3,25 juta jiwa per tahun selama periode 2010–2020. Penurunan laju pertumbuhan ini sejalan dengan turunnya *Total Fertility Rate* (TFR) dari 5,6 pada tahun 1971 menjadi 2,18 pada tahun 2020. Capaian ini menunjukkan adanya peran signifikan dari implementasi program Keluarga Berencana (KB) yang berhasil menekan angka kelahiran melalui peningkatan penggunaan kontrasepsi. Namun demikian, efektivitas program KB masih bervariasi antar daerah, yang dipengaruhi oleh perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. (BPS Indonesia, 2023)

Hasil proyeksi penduduk Indonesia juga menunjukkan jumlah penduduk diperkirakan terus meningkat dari 219,8 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi sekitar 270,5 juta jiwa pada tahun 2025. Meskipun demikian, laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tren penurunan, yang sebagian besar disebabkan oleh menurunnya tingkat kelahiran. Hal ini tercermin dari penurunan *Crude Birth Rate* (CBR) dari 20 per 1000 penduduk menjadi 15 per 1000 penduduk dalam kurun waktu yang sama, menunjukkan adanya indikasi keberhasilan implementasi program Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013).

Meskipun berbagai indikator menunjukkan keberhasilan program Keluarga Berencana dalam menurunkan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan

penduduk, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Ketimpangan keberhasilan antarwilayah menjadi salah satu isu penting yang perlu diperhatikan, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan, ekonomi, dan akses layanan kesehatan yang masih rendah.

Selain itu, perubahan pola pikir masyarakat terhadap idealisasi keluarga besar, faktor sosial budaya, serta persepsi terhadap penggunaan alat kontrasepsi juga turut memengaruhi efektivitas program. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali sejauh mana pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana berjalan efektif dan diterima masyarakat di berbagai lapisan sosial. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai dinamika pelaksanaan program Keluarga Berencana di Indonesia, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta implikasinya terhadap upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan keluarga.

Dengan demikian, kajian ini berfokus untuk mengetahui efektivitas kebijakan program Keluarga Berencana (KB) dalam menekan angka kelahiran di Indonesia. Melalui pendekatan studi literatur, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan KB sebagai instrumen pengendalian pertumbuhan penduduk, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta perumusan kebijakan kependudukan yang lebih optimal.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan (Moleong, 2011). Dalam kajian literatur, peneliti menelaah beragam sumber informasi seperti jurnal, artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, serta berbagai sumber daring lainnya yang dianggap relevan dan mendukung topik kajian (Damanik, 2024)

Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengolah berbagai sumber yang relevan, seperti buku dan jurnal ilmiah (Moleong, 2011). Selain itu juga dari laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, serta situs resmi lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan program Keluarga Berencana di Indonesia. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan tingkat kredibilitas, relevansi, serta kemutakhiran informasinya.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian tematik yang bersifat deskriptif, dan penarikan kesimpulan yang menghubungkan hasil kajian literatur dengan teori serta fakta empiris yang mendukung.

Meskipun kajian ini bergantung pada data sekunder yang memiliki keterbatasan dalam hal pemerataan dan kedalaman informasi, upaya untuk meminimalkan bias dilakukan dengan cara memilih sumber yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

1. Program Keluarga Berencana di Indonesia

Program keluarga berencana di Indonesia memiliki sejarah panjang yang signifikan dalam upaya membatasi pertumbuhan penduduk. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang didirikan pada tahun 1970 berdasarkan Keputusan Presiden berperan sebagai lembaga koordinasi utama dalam melaksanakan berbagai program pengendalian kelahiran. Pembentukan BKKBN ini menandai dimulainya secara resmi program keluarga berencana sebagai bagian dari kebijakan nasional (Putri et al., 2019). Sebelum gerakan keluarga berencana secara resmi diakui sebagai program pemerintah, gerakan ini dipelopori oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), yang didirikan pada tahun 1957 (Apriani et al, 2021).

Dengan membatasi tingkat kelahiran, program keluarga berencana bertujuan untuk mengatur pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan dengan membuat keluarga lebih kecil, sehat, dan sejahtera. Selain itu, program ini membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, mendukung tujuan pembangunan nasional yang lebih luas (Ria et al, 2021). Oleh karena itu, program keluarga berencana bukan hanya program kesehatan. Program ini merupakan bagian penting dari strategi populasi terpadu yang memiliki hubungan langsung dengan pembangunan sosial dan ekonomi.

Organisasi pelaksana utama yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program keluarga berencana di tingkat federal, negara bagian, dan lokal adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pembuatan kebijakan, koordinasi antar kementerian, pelaksanaan program, dan pembuatan media pendidikan dan komunikasi publik merupakan sebagian dari tugas yang dilakukan oleh BKKBN.

Selain itu, BKKBN bekerja sama dengan fasilitas medis untuk menyediakan layanan kontrasepsi. (Rahmadhony, 2021). Salah satu pendekatan strategis yang dilakukan BKKBN adalah kampanye "Dua Anak Cukup" yang berfungsi sebagai slogan nasional untuk menginformasikan jumlah anak yang optimal bagi keluarga. Kampanye "Dua Anak Cukup", bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang jumlah anak yang ideal untuk keluarga. Ini merupakan salah satu pendekatan strategis yang dilakukan BKKBN. Untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pasangan usia reproduksi dalam program KB, konseling komprehensif dan keterlibatan komunitas mendukung kampanye ini (Mahdani et al, 2024). Selain itu, pemerintah menyediakan layanan kontrasepsi gratis melalui fasilitas

kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga memudahkan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang beruntung (Ria et al, 2021).

2. Tingkat Keberhasilan dan Capaian Program Keluarga Berencana

Menurut Tingkat Kesuburan Total (TKT), Program Keluarga Berencana (KB) Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menurunkan angka kelahiran. TKT Indonesia telah turun dari sekitar 2,6 anak per wanita pada awal 2010-an menjadi sekitar 2,3 pada 2024, menurut data terbaru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jumlah rata-rata anak per wanita selama masa reproduksinya kini mendekati tingkat penggantian populasi optimal untuk pembangunan berkelanjutan, yang mencerminkan efektivitas metode kontrasepsi.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk adalah bukti kontribusi besar program keluarga berencana, yang berdampak positif pada stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Program ini tidak hanya mengurangi jumlah kelahiran tetapi juga meningkatkan kualitas keluarga dengan mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan ibu dan anak. Sebuah evaluasi yang dilakukan di beberapa kota besar seperti Padang Panjang menunjukkan bahwa meskipun program ini berhasil, ada beberapa masalah yang terkait dengan sosialisasi dan bahwa layanan harus lebih mudah diakses untuk semua orang (Andani & Putri, 2024).

Melalui penurunan tingkat kesuburan secara keseluruhan, peningkatan penggunaan kontrasepsi, dan pencapaian target layanan keluarga berencana strategis di tingkat nasional dan regional, program keluarga berencana Indonesia secara keseluruhan telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dan menjadi pondasi kuat untuk pembangunan berkelanjutan nasional dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3. Faktor – Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Program Keluarga Berencana

a. Faktor Internal

Ciri-ciri dan kondisi masyarakat sebagai penerima manfaat program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor internal yang menentukan tingkat efektivitas program tersebut. Salah satu faktor utama adalah pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat KB. Berdasarkan penelitian Sumarsih (2023) masih ada kendala berupa pandangan negatif dan kurangnya pengetahuan mendalam tentang teknik KB, terutama kontrasepsi jangka panjang seperti IUD (Sumarsih, 2023).

Selain aspek pemahaman, faktor ekonomi juga memegang peranan penting. Keluarga dengan pendapatan rendah cenderung tidak memiliki akses yang cukup ke informasi KB, yang mengakibatkan partisipasi yang lebih rendah dalam program. Namun, penyediaan layanan kontrasepsi gratis membantu mengurangi hambatan ini dengan memberikan akses yang lebih mudah dan merata, khususnya di daerah dengan kondisi ekonomi yang

menantang. Di sisi lain, pendekatan yang sensitif terhadap nilai budaya dan kepercayaan agama orang sering menjadi alasan penolakan masyarakat terhadap program KB karena layanan kontrasepsi gratis membuat akses lebih mudah dan merata, terutama di daerah dengan kondisi ekonomi yang sulit (Rosidi & Lestari, 2025).

Selain itu, dukungan dari keluarga, khususnya pasangan, juga berperan besar dalam keberhasilan program. Wanita enggan melanjutkan program keluarga berencana atau menggunakan kontrasepsi jika mereka tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Wanita yang mendapatkan dukungan penuh lebih cenderung menggunakan KB, sementara wanita yang tidak memiliki pasangan yang mendukung dapat berhenti menggunakannya. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk mengubah persepsi masyarakat dan meningkatkan pemahaman mereka tentang program KB (Aperiani et al, 2023).

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang berkontribusi pada keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia sangat beragam dan saling terkait. Layanan keluarga berencana yang diberikan oleh tenaga kesehatan merupakan faktor penting dalam keberhasilan program ini. Layanan yang cepat, ramah, dan berkualitas tinggi sangat memengaruhi minat dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi, yang berdampak positif pada keberlanjutan program (Joriska & Raudah, 2024). Selain itu, dukungan pemerintah yang kuat, seperti kampanye “Dua Anak Cukup”, pendanaan yang memadai, dan peraturan yang mengatur distribusi kontrasepsi yang adil, sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat, terutama di wilayah terpencil (Marpaung et al, 2024).

Selain itu, pekerjaan petugas lapangan seperti tenaga kesehatan dan konselor kesehatan sangat penting karena mereka bekerja dengan masyarakat secara langsung. Kepercayaan masyarakat terhadap petugas ini sebagai sumber informasi yang akurat sangat memengaruhi keputusan masyarakat untuk mengikuti program KB.

Kemampuan petugas dalam menangani kekhawatiran efek samping dan memberikan edukasi yang tepat juga sangat penting untuk keberhasilan program (Sukri et al, 2025). Faktor ini tetap relevan karena ketersediaan kontrasepsi yang memadai sangat penting. Jika ketersediaan kontrasepsi terbatas atau distribusinya tidak lancar, penggunaan kontrasepsi dapat menurun, yang berdampak negatif pada hasil program (Okta Joriska & Raudah, 2024)

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana

a. Persepsi Negatif Terhadap KB

Pendapat negatif masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. Banyak orang beranggapan bahwa penggunaan kontrasepsi, terutama yang bersifat jangka panjang, dapat menyebabkan efek samping negatif seperti kenaikan berat badan, mual, pusing, dan pendarahan. Karena citra ini, beberapa calon pengguna enggan untuk memulai atau melanjutkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang, dan lebih memilih opsi yang lebih aman namun kurang efektif seperti tablet dan suntikan. Banyak pengguna percaya bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami manfaat dan efek samping kontrasepsi, yang sebagian disebabkan oleh informasi yang kurang memadai dari tenaga kesehatan selama konsultasi (Novita, 2024).

Selain itu, keyakinan sosial dan ketidakpastian yang timbul akibat kurangnya dukungan dari pasangan terutama suami seringkali memperkuat sikap-sikap yang tidak menguntungkan ini. Akibatnya, pria cenderung kurang mendukung program keluarga berencana, yang berarti bahwa wanita yang mungkin menghadapi tekanan dari keluarga dan masyarakat memainkan peran yang lebih penting dalam kesuksesan program-program tersebut (Ardelia, 2025). Pendapat negatif tentang perencanaan keluarga juga dapat dipengaruhi oleh stigma sosial dan keyakinan agama tertentu; oleh karena itu, untuk mengurangi hambatan-hambatan ini, diperlukan strategi yang lebih inklusif dan peka terhadap budaya (Widnyaningsih, 2022).

b. Keterbatasan Sarana dan Tenaga Penyuluh

Selain persepsi buruk masyarakat terhadap KB yang cenderung membuat pasangan dan keluarga tidak mendukung adanya program ini, kekurangan tenaga penyuluh dan sumber daya juga menjadi kendala dalam implementasi program KB. Karena saat ini jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sangat sedikit, seorang petugas seringkali harus mengawasi banyak desa atau wilayah padat penduduk. Tenaga penyuluh tidak dapat melaksanakan tugas pemantauan, konseling, dan pendampingan di lapangan dengan efektif seperti yang seharusnya karena situasi ini (Sudarta, 2022).

Sarana dan prasarana mereka, termasuk kurangnya transportasi dan metode komunikasi yang efisien untuk menjangkau populasi yang lebih luas, terutama di daerah pedesaan, tidak memadai, ditambah dengan jumlah petugas penyuluhan yang sedikit (Ardelia, 2025).

Dengan meningkatkan pelatihan dan pemberdayaan petugas penyuluhan serta memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan penyuluhan, pemerintah dan BKKBN telah berupaya mengatasi masalah ini; namun, masalah terkait penyediaan tenaga kerja yang adil dan infrastruktur yang memadai tetap menjadi tugas yang signifikan (Sukri et al, 2025). Bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti PKK dan kader Posyandu merupakan

cara lain untuk memperkuat jaringan penyuluhan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program keluarga berencana.

c. Ketimpangan Partisipasi Antar Daerah Perkotaan dan Pedesaan

Perbedaan tingkat partisipasi dalam Program Keluarga Berencana (KB) antara daerah perkotaan dan pedesaan. Terdapat ketimpangan dalam penggunaan kontrasepsi modern, meskipun penduduk perkotaan cenderung memiliki tingkat pendidikan dan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Meskipun memiliki kesadaran yang lebih rendah tentang kontrasepsi, wanita menikah di daerah pedesaan lebih cenderung menggunakannya (62%) dibandingkan dengan wanita menikah di daerah perkotaan (55%), menurut penelitian yang dilakukan di Provinsi Gorontalo (Syamsul et al, 2020).

Beberapa faktor berkontribusi terhadap ketidakseimbangan ini, termasuk kenyataan bahwa layanan keluarga berencana kurang mudah diakses dan tersedia di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan, serta adanya tekanan sosial dan budaya yang lebih besar di daerah pedesaan untuk menggunakan layanan keluarga berencana. Namun, di daerah metropolitan, seringkali terdapat ketidakcocokan antara layanan yang tersedia dan permintaan akan alat keluarga berencana, serta keterbatasan distribusi dan informasi yang tidak ditargetkan dengan baik. Perbedaan norma budaya dan sikap yang memengaruhi keputusan keluarga untuk menggunakan layanan keluarga berencana juga menjadi hambatan lain.

Untuk menekan perbedaan ini, pemerintah dan pelaksana program KB harus membuat strategi yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam program KB di seluruh Indonesia, pendekatan yang berbasis bukti dan intervensi yang mempertimbangkan kondisi lokal sangat diperlukan. Ini akan memungkinkan program KB beroperasi dengan baik di semua wilayah (Sukri et al, 2025)

5. Hubungan Implementasi Program Keluarga Berencana dengan Penurunan Natalitas (Angka Kelahiran)

Temuan literatur menunjukkan bahwa implementasi program Keluarga Berencana (KB), termasuk kegiatan sosialisasi melalui Instruktur Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta distribusi alat kontrasepsi, telah terbukti secara signifikan menurunkan tingkat kesuburan total (Total Fertility Rate/TFR) dan angka kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh adanya korelasi negatif yang kuat antara pelaksanaan program keluarga berencana dan penurunan tingkat kelahiran.

Ketersediaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), seperti IUD dan implan yang memiliki efektivitas hingga sepuluh tahun, menjadi salah satu isu kebijakan yang sangat penting dibandingkan dengan metode jangka pendek seperti suntikan atau pil.

Meskipun terdapat hambatan berupa efek samping kontrasepsi dan penolakan budaya yang dapat mengurangi efektivitas program, hasil studi kasus di beberapa daerah menunjukkan adanya penurunan TFR dari 2,32 menjadi nilai yang lebih rendah di wilayah yang memiliki partisipasi aktif dalam program keluarga berencana, dengan tingkat keterlibatan mencapai 65–87% (Deffinika et al, 2023)

Secara keseluruhan, keberhasilan program ini juga ditunjang oleh kerangka hukum nasional, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Terdapat bukti bahwa tanpa adanya perencanaan keluarga yang efektif, laju pertumbuhan penduduk dapat melebihi 4% per tahun, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang signifikan (Deffinika et al, 2023)

6. Efektivitas Implementasi Kebijakan

Efektivitas implementasi kebijakan program Keluarga Berencana (KB) dapat dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan publik Edward III yang menekankan empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada dimensi komunikasi, pelaksanaan sosialisasi program dilakukan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan manfaat program KB.

Berdasarkan hasil kajian literatur, implementasi program KB di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2021 secara umum dinilai cukup efektif, dengan indikator tingkat prevalensi kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) mencapai sekitar 87,78% di beberapa kecamatan, lebih tinggi dibandingkan target nasional sebesar 66,46%. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada aspek unmet need atau kebutuhan KB yang belum terpenuhi, yang mencapai sekitar 12%. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah PLKB—rata-rata hanya dua orang per kecamatan, dari idealnya empat orang—serta dampak pandemi COVID-19 yang sempat membatasi mobilitas petugas dan masyarakat.

Meskipun struktur birokrasi yang relatif sentralistik terkadang memperlambat respon di tingkat lokal, terdapat berbagai bentuk adaptasi di lapangan, seperti layanan kontrasepsi door-to-door dan kerja sama dengan tokoh masyarakat untuk memperkuat keterlibatan warga. Program Bangga Kencana, yang mengintegrasikan aspek keluarga berencana dengan pembangunan keluarga sejahtera, juga turut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut (Sumtaki & Jamiludin, 2024).

7. Perbandingan Efektivitas Program Keluarga Berencana di Berbagai Wilayah Indonesia

Tabel 1. Perbandingan Efektivitas Program Keluarga Berencana

Wilayah	Kondisi Demografis / Geografis	Capaian Program KB	Kendala/ Faktor Sosial-Ekonomi	Sumber
Kota Pekanbaru	Perkotaan	Laju pertumbuhan penduduk menurun menjadi 1,53% (2010–2021)	Akses layanan tinggi, tingkat pendidikan masyarakat relatif baik	BPS & Damanik (2022)
Kecamatan Bandar, Pacitan	Wilayah pegunungan	Penurunan TFR sebesar 0,29, namun peningkatan kebutuhan KB tak terpenuhi sebesar 2%	Pekerjaan mayoritas di sektor pertanian; preferensi anak lebih banyak	Azzahra & Sundari (2022)
Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh	Pesisir/pascabencana	Penurunan populasi 2019–2022, namun masih terkendala SDM dan sarana	Kekurangan tenaga penyuluh dan fasilitas kesehatan	Sundari (2023)
Wilayah pedesaan terpencil	Jarak ke puskesmas 6–12 km	Tingkat penggunaan MKJP lebih rendah 12-21% dibandingkan wilayah dekat fasilitas	Aksesibilitas rendah, kesadaran masyarakat terhadap kontrasepsi terbatas	Kemenkes (2022)
Nasional (pra-pandemi vs pasca-pandemi)	Seluruh Indonesia	TFR stabil di 2,45 (2019) → penurunan melambat pasca-pandemi	Adaptasi teknologi: sosialisasi via Zoom & WhatsApp meningkatkan edukasi KB	Azzahra & Sundari (2022)

8. Implikasi Kebijakan dari Program Keluarga Berencana

Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program Keluarga Berencana. Pemerintah bersama BKKBN perlu memperkuat kapasitas sumber daya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dengan memperbaiki rasio penugasan yang saat ini masih sekitar 1 PLKB untuk 3 wilayah kerja. Upaya ini penting agar jangkauan pelayanan dan pengawasan program dapat lebih optimal. Selain itu, sosialisasi penggunaan Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dapat dikembangkan melalui pendekatan testimoni dan kolaborasi dengan tokoh agama guna mengurangi resistensi budaya yang masih terjadi di masyarakat (Janani & Arifin, 2024).

Pemanfaatan inovasi digital, seperti pengembangan aplikasi KB, juga direkomendasikan untuk meningkatkan kesadaran reproduksi sehat dan mencegah pernikahan dini. Di sisi lain, perluasan program Kampung KB di daerah tertinggal, peningkatan partisipasi pria melalui kampanye berbasis kesetaraan gender, serta integrasi dengan program penurunan stunting dinilai dapat memperkuat pencapaian sasaran. Partisipasi kader sukarela seperti PPKBD/Sub-PPKBD juga perlu diperluas melalui kegiatan sosialisasi langsung ke rumah-rumah (door-to-door). Akhirnya, pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan alokasi anggaran sesuai dengan arah kebijakan RPJMN 2020–2024 untuk mencapai target *Total Fertility Rate* (TFR) sebesar 2,1, serta mengoptimalkan potensi bonus demografi Indonesia (Janani & Arifin, 2024).

Simpulan

Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia terbukti efektif dalam mencegah kelahiran baru dan mengendalikan pertumbuhan penduduk, namun beberapa langkah strategis tetap diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan program secara menyeluruh. Pendidikan dan sosialisasi mengenai kontrasepsi, terutama penggunaan metode jangka panjang, perlu diperluas agar pemahaman masyarakat meningkat dan resistensi sosial budaya dapat diminimalkan. Akses layanan KB juga harus diperkuat, terutama di daerah terpencil, melalui peningkatan kapasitas tenaga penyuluh dan kerja sama lintas aktor seperti pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan tokoh lokal. Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital berpotensi mempercepat penyebaran informasi dan mendorong partisipasi masyarakat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal agar efektivitas program KB semakin optimal dan mampu mendukung pencapaian bonus demografi. Maka dari itu untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian lebih berfokus pada efektivitas pendekatan digital, dukungan tokoh lokal, serta model sosialisasi yang paling sesuai bagi kelompok masyarakat berbeda sehingga rekomendasi kebijakan dapat semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Andani, G. Y., & Putri, N. E. (2024). Evaluasi Program Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Dinas Sosial , Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 9999–10004.
- Aperiani, K., Sugianor, & Hasbiyah, S. (2023). Efektivitas Program Keluarga Berencana IUD Di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Negara*, 596–608. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/571>
- Apriani, E., Idris, M., & Damayanti, N. (2021). Efektivitas Program Kampung Kb Di Desa Sidorejo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Swarnabhumi*, 6(1), 38–45.
- Ardelia, A. T. (2025). Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia Indonesia Population Projection 2010-2035*. Badan Pusat Statistik Indonesia, 468.
- BPS Indonesia, S. I. (2023). *Statistik Kependudukan (Statistik Indonesia 2023)*. Badan Pusat Statistik Indonesia 2023.
- Damanik, D. (2024). *Metode Penelitian Pendidikan Dasar*.
- Daud, et al. (2022). Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (Kb) Spiral Dalam Mengendalikan Angka Kelahiran. *Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial (JAEIS)*. 1(November), 84–89.
- Deffinika, I., Soelistijo, D., & Astina, I. K. (2023). Efektivitas Program Keluarga Berencana Terhadap Penurunan Angka Kelahiran (Studi Kasus di Kecamatan Bandar) Program Keluarga Berencana memberikan pengetahuan kepada Pasangan Usia. *Journal of Demography, Ethnography, and Social Transformation Program*, 3(1), 84–99.
- Janani, M., & Arifin, K. I. (2024). Menjalankan Program Keluarga Berencana. 1(2), 8–17.
- Lexy J Moleong, T. S. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Mahdani, S., Siregar, L. N. S., Christine, J., Amalia, N. R., Silitonga, H. A., & Lumbantoruan, M. N. (2024). Efektivitas Program Keluarga Berencana di Kota Medan: Tinjauan Komunikasi Publik Melalui Media Sosial. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS)*, 2(5), 6–11. <https://ojs.staira.ac.id/index.php/IJOMSS/index>
- Marpaung, S., Tambun, M., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Medan, M. H. (2024). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Penggunaan Kontrasepsi. *Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Kebidanan Nusantara (JIKKN)*, 2(1), 2025. <https://teewanjournal.com/index.php/jikkn/index>
- Novita. (2024). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Donggala. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 395–402.

- Okta, J. D., & Raudah, S. (2024). Efektivitas Program Keluarga Berencana Metodekontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Kecamatanamuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Tangga Ulin Hilir dan Desa Kembang Kuning). *Jurnal Administrasi Negara*, Vol.6,No.1, 223–229.
- Putri, P. K. D., Hubeis, A. V., & Sarwoprasodjo, S. (2019). Kelembagaan Dan Capaian Program Keluarga Berencana (Kb): Dari Era Sentralisasi Ke Desentralisasi. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.14203/jki.v14i1.335>
- Rahmadhony, A. P. M. D. G. M. and S. (2021). Part of the Administrative Law Commons, Comparative and Foreign Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the Natural Resources Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 3. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3124>
- Ria, I., Sidabukke, R., Turisna Octavia, Y., & Saragih, F. L. (2021). Di Bpm Idaria Rs Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 2(2), 189–200.
- Sudarta. (2022). Bkkbn 2020. *Poltekes Kemenkes Yogyakarta*, 16(1), 1–23.
- Sukri, I., Rasjusti, N. I., Muhammad, F., Makassar, U. N., & Makassar, U. N. (2025). Evaluasi Efektivitas Program Keluarga Berencana di Perkotaan : Studi Kasus Kota Makassar. 5(2), 3504–3513.
- Sumarsih, S. (2023). Hubungan Karakteristik Ibu Nifas Terhadap Pemilihan Metode Kontrasepsi Pascasalin Di Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung. *Sinar : Jurnal Kebidanan*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.30651/sinar.v5i1.17321>
- Sumtaki, Jamiludin, R. (2024). © yos soedarso economics journal (yej) ©. 6(2), 35–47.
- Syamsul, S., Bakri, B., & Limonu, H. S. (2020). Penggunaan Alat Kb Pada Wanita Kawin Di Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Hasil SDKI 2017 Provinsi Gorontalo). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(1), 71. <https://doi.org/10.14203/jki.v15i1.461>
- Widnyaningsih. (2022). Pendapat negatif tentang perencanaan keluarga juga dapat dipengaruhi oleh stigma sosial dan keyakinan agama tertentu; oleh karena itu, untuk mengurangi hambatan-hambatan ini, diperlukan strategi yang lebih inklusif dan peka terhadap budaya. *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia*, Vol 6, No.
- Yun, D. R. I., & Lestari, W. O. S. W. (2025). Penyuluhan Keluarga Berencana untuk Meningkatkan Kesehatan Keluarga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bina Usada (ABDINUSA)*, 3(1), 17–21. <https://doi.org/10.36474/abdinusa.v3i1.505>